

OPTIMALISASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BUMN UNTUK KAWASAN SUNGAI CIKAPUNDUNG BANDUNG

R. Indriyati

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
Email: r_indriya@yahoo.com

ABSTRAK

Dewasa ini penerapan CSR bagi perusahaan menjadi semakin penting. CSR sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat memiliki ketergantungan dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat bagikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. CSR juga memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari komunitas memiliki peranan dalam komunitasnya. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran dan fungsi yang strategis, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil. Peran CSR BUMN dalam pelestarian sungai antara lain membantu pemerintah melakukan regenerasi sungai cikapundung sebagai ruang public dan juga mengenai penanganan banjir di daerah sekitar Sungai Cikapundung Kota Bandung. Untuk menemukan solusi terbaik dalam penataan ruang publik di bantaran Sungai Cikapundung ini, adalah sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pengembalian fungsi sungai yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata Kunci: CSR, BUMN, dan Revitalisasi Sungai

ABSTRACT

Today the application of CSR becomes increasingly important for the company. CSR has become a necessity for companies. The company's presence in the midst of society's dependence coined by people who are nearby. The relationship between the company and the community share the two sides of a coin that can not be separated. CSR also contributed positively to the relationship between the company and the community. Company as part of the community has a role in the community. Companies are not only economic benefits hunt alone, but also a concern for the environment and social welfare. State-Owned Enterprises (SOEs) have a strategic role and functions, as executor of public services, balancing large private forces, and helped small business development. SOE CSR role in the preservation of rivers such as helping the government to regenerate the river Cikapundung as a public space and also regarding the handling of flooding in the area around the River Cikapundung Bandung. To find the best solution in the structuring of public space in this Cikapundung riverbank, is

very important to develop a policy of restoration of the river that can balance the interests of economic, social and environmental sustainability sustainable.

Keywords: CSR, enterprises, and the River Revitalization

A. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan di Indonesia akan melakukan berbagai kegiatan terencana untuk dapat menjaga eksistensinya dan menjadi *Good Bussiness*. Salah satunya adalah dengan menerapkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Penerapan CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (*The World Bussiness Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Wibisono, 2007).

Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar.

Perihal penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri, yaitu UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNNo.67 TLN No.4274, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). CSR merupakan salah satu upaya pemerintah dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Dalam menerapkan CSR, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility(CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, social, dan lingkungan. Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan bertujuan untuk mengkreasikan masyarakat mandiri. CSR terkait dengan sustainability dan acceptability, artinya diterima dan berkelanjutan untuk berusaha disuatu tempat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Princes of Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, pertama, menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. Kedua, environments yang berbicara tentang lingkungan. Ketiga, adalah Good Corporate Governance. Keempat, Social cohesion. Artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan social. Kelima adalah economic strength atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

CSR perlu dipahami sebagai komitmen bisnis untuk melakukan kegiatannya secara beretika dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Artinya, harus ada kesepakatan bersama dalam mengimplementasikan CSR tersebut. kalau sebatas tanggung jawab lingkungan, misalnya sudah diatur dengan lebih lengkap dalam undang-undang lain yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Peran PR dalam Implementasi CSR

Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR juga dilakukan melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap organisasi.

Dalam implementasi CSR ini public relations (PR) mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, di semua bidang pembahasan di atas boleh dikatakan PR terlibat di dalamnya, sejak *fact finding*, *planning*, *communicating*, hingga *evaluation*. Jadi ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana CSR merupakan bagian dari *community relations*. Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Pengumpulan Fakta

Banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar daerah operasional perusahaan. Mulai dari permasalahan lingkungan seperti polusi, sanitasi lingkungan, pencemaran sumber daya air, penggundulan hutan sampai dengan permasalahan ekonomi seperti tingkat pengangguran yang tinggi, sumber daya

manusia yang tidak berketerampilan, rendahnya kemauan berwirausaha dan tingkat produktivitas individu yang rendah.

PR bisa mengumpulkan data tentang permasalahan tersebut dari berbagai sumber, misalnya dari berita media massa, data statistik, obrolan warga, atau keluhan langsung dari masyarakat. Selain itu masih banyak sumber yang bisa digunakan untuk mengumpulkan fakta mengenai persoalan sosial yang dihadapi komunitas. PR juga bisa menelusuri laporan-laporan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau LSM mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Perumusan Masalah

Masalah secara sederhana bisa dirumuskan sebagai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dialami, yang untuk menyelesaikannya diperlukan kemampuan menggunakan pikiran dan keterampilan secara tepat. Misalnya, dari pengumpulan fakta diketahui salah satu masalah yang mendesak dan bisa diselesaikan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi adalah rendahnya keterampilan para pemuda sehingga tak

bisa bersaing di pasar kerja atau tak bisa diandalkan untuk membuka lapangan kerja bagi dirinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan: Rendahnya keterampilan kerja pemuda lulusan sekolah menengah. Namun tidak semua pemuda tamatan sekolah menengah yang rendah tingkat keterampilan kerjanya yang diidentifikasi sebagai masalah. Namun terbatas pada komunitas sekitar lokasi perusahaan atau di beberapa kota. Jadi, dalam merumuskan masalah tersebut PR mulai memfokuskan pada komunitas organisasi. Bila komunitasnya dirumuskan secara sederhana, berarti komunitas berdasarkan lokasi yakni komunitas sekitar wilayah operasi korporat. Namun bila komunitasnya dipandang sebagai struktur interaksi maka komunitas tersebut lepas dari pertimbangan kewilayahan, tetapi lebih pada pertimbangan kesamaan kepentingan.

3. Perencanaan dan Pemrograman

Perencanaan merupakan sebuah prakiraan yang didasarkan pada fakta dan informasi tentang sesuatu yang akan terwujud atau terjadi nanti. Untuk mewujudkan apa yang diperkirakan itu dibuatlah suatu program. Setiap program biasanya diisi dengan berbagai kegiatan.

Kegiatan sebagai bagian dari program merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan program guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kembali kepada perumusan masalah tentang rendahnya keterampilan kerja pemuda lulusan sekolah menengah, maka PR menyusun rencana untuk mencapai tujuan agar para pemuda lulusan sekolah menengah itu memiliki keterampilan kerja yang bisa digunakan untuk mencari kerja atau membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, program yang disusun misalnya menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi mereka.

4. Aksi dan Komunikasi

Aspek dari aksi dan komunikasi inilah yang membedakan kegiatan community relations dalam konteks PR dan bukan PR. Di mana watak PR ditampilkan lewat kegiatan komunikasi. PR pada dasarnya merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membangun dan menjaga reputasi dan citra organisasi di mata publiknya. Karena itu, dalam program CSR selalu ada aspek bagaimana menyusun pesan yang ingin disampaikan kepada

komunitas, serta melalui media apa dan cara bagaimana.

Sedangkan aksi dalam implementasi program yang sudah direncanakan, pada dasarnya sama saja dengan implementasi program apa pun. Kembali pada contoh kasus awal, ketika program pendidikan dan pelatihan keterampilan itu dijalankan, harus ada ruangan, baik untuk penyampaian teori maupun bengkel kerja sebagai tempat praktik. Di situlah aksi pendidikan dan pelatihan dijalankan. Di dalamnya tentu saja ada komunikasi yang menjelaskan kenapa program itu dijalankan, juga masalah tanggungjawab sosial organisasi pada komunitasnya sehingga memilih untuk menjalankan program kegiatan tersebut. Dengan begitu diharapkan akan berkembang pandangan yang positif dari komunitas terhadap organisasi sehingga reputasi dan citra organisasi menjadi baik.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan keharusan pada setiap akhir program atau kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program. Berdasarkan hasil evaluasi ini bisa diketahui apakah program bisa dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan dengan melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Namun dalam

konteks *community relations* perlu diingat bahwa evaluasi bukan hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan belaka. Melainkan juga dievaluasi bagaimana sikap komunitas terhadap organisasi. Evaluasi atas sikap publik ini diperlukan karena, pada dasarnya *community relations* ini meski merupakan wujud tanggungjawab sosial organisasi, tetap merupakan kegiatan PR.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pandangan Gerard Fonteneau merupakan sebuah mitos yang sama tuanya dengan keberadaan kapitalisme. Hanya saja saat ini bentuk CSR yang dipahami oleh banyak pihak jauh lebih berkembang dari pada masa awal kapitalisme. Pada abad ke 19, di masa awal perkembangan kapitalisme, para pekerja menjadi objek eksploitasi secara sistematis (upah rendah, pekerja tidak tetap, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dll). Bahkan mereka menjadi objek pencitraan buruk dengan penamaan “kelas pekerja, kelas yang berbahaya”. Tetapi kemudian terdapat beberapa perubahan yang dimulai dengan penghapusan buruh anak di Eropa antara tahun 1850 dan 1920, sehingga hal ini menjadi momentum yang sangat bermakna dalam kasus ini.

Di beberapa negara seperti Perancis, Belgia, dan Inggris Raya, secara konstan menjadi pemicu untuk adanya perkembangan tanggung jawab korporasi terhadap perbaikan standar pekerja berikutnya khususnya pekerja anak, mulai dari waktu kerja, sekolah dan lain sebagainya.

Dilihat dari kondisi tersebut istilah pekerjaan sosial industri yang diajukan Edi Suharto, khususnya yang bersifat internal (pengembangan SDM korporasi, terapi individu atau pekerja, terapi kelompok) mewakili dari perkembangan awal CSR yang dimaksudkan oleh Fonteneau tersebut. Dalam perkembangannya beberapa pekerjaan sosial itu berkembang menjadi aturan hukum yang mengikat dan melingkupi berbagai dimensi permasalahan sosial meskipun lebih bersifat pada tanggung jawab internal seperti kesejahteraan buruh, tanggung jawab pengelolaan lingkungan dan beberapa hal lain yang sebagian besar telah menjadi hal pokok yang telah diatur oleh hukum dan harus dilaksanakan oleh korporasi.

Secara konseptual, eksistensi dari CSR sebagai bagian kepedulian sektor privat pada masyarakat dan lingkungan

sosial merupakan hal yang positif, akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan pada perkembangan berikutnya. Banyak yang mengkritisi secara konseptual maupun pelaksanaan praktek CSR yang ternyata tetap lebih memprioritaskan aspek profit korporasi sehingga bentuk kegiatan CSR tidak jarang apabila memberikan keuntungan bagi perusahaan, tidak langsung secara materiil tapi lebih bersifat tidak langsung seperti *good will* atau nama baik korporasi, kedekatan dengan birokrasi melalui bantuan dana pembangunan, dan promosi kemitraan dengan bidang tertentu yang kesemuanya memberikan poin lebih bagi pihak korporasi. Variabel-variabel tersebut secara otomatis memberikan pengaruh terhadap lemahnya kesadaran dan inisiatif korporasi terutama dibidang lingkungan akibat orientasi yang tidak seimbang antara tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pandangan negatif semakin menguat ketika dalam faktanya terjadi sebuah *trend* pelepasan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan membiarkan kegiatan operasional korporasi tanpa adanya sebuah konsep analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh dan

berkelanjutan. Program CSR lebih bermotif pada keuntungan perusahaan dalam hal ini masalah keamanan dan dorongan masyarakat lokal yang menuntut pasca kran kebebasan sipil era desentralisasi terbuka. Desentralisasi memberikan legitimasi keterlibatan sektor prihat dalam program-program pembangunan. Kedua, spirit tersebut memberi ruang yang cukup luas bagi sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menyumbangkan *resources*-nya dalam proses pembangunan. Keduanya merupakan fenomena kekuatan global yang sulit ditolak baik oleh negara-negara maju maupun negara berkembang. Desentralisasi merupakan manifestasi keterbatasan negara untuk melakukan peranan sentralnya. Sayangnya peran sektor privat dalam hal ini korporasi (perusahaan) lebih dikarenakan tuntutan dan rasa keamanan bukan karena komitmen dan kesadaran moral sebagaimana terkandung dalam prinsip CSR. Bentuk CSR dari BUMN antara lain; menebar benih ikan mas dan menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekosistem Sungai Cikapundung.

Urgensi Kesadaran dan Inisiatif *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menakar kesadaran dan inisiatif *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang lingkungan tentu tidak bisa dipisahkan dari implikasi yang selama ini terjadi dalam tataran realitas terkait tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, dimana konsepsi industrialisasi yang diaplikasikan oleh korporasi (perusahaan) hampir seluruhnya berorientasi pada keuntungan sumber daya manusia dengan memberikan porsi perhatian yang minim terhadap kelestarian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut juga diperparah dengan carut marutnya standar pengawasan dan pelaksanaan praktis diantara korporasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan. Apabila realitas seperti ini dibiarkan terus berlarut tanpa adanya kesadaran dan inisiatif dari para pemangku kepentingan untuk membangun, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup maka sebuah keniscayaan fenomena terlantarnya sumber daya alam dan lingkungan hidup akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alat produksinya di masa-masa yang akan datang.

Permasalahan diatas merupakan sebuah tantangan bagi para pemangku

kepentingan dalam mengatasi berbagai krisis pengelolaan lingkungan ditengah arus liberalisasi sektor industri dan gencarnya iklim investasi di Indonesia. Seperti dikatakan oleh B. Tamam Achda, memang diakui bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh industri telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Hal inilah yang menjadikan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang responsif dan tanggap terhadap sumber daya alam menjadi relevan dan penting (*urgen*) dilaksanakan oleh korporasi perusahaan-perusahaan.

Meningkatnya inisiatif dan kesadaran korporasi melalui pelaksanaan program CSR-nya dalam hal ini menjadi sebuah titik tekan yang penting dalam mengatasi problematika seputar lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya kuantitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan melakukan kegiatan eksploitasi serta ekstraksi terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam harus pula berbanding lurus dengan kualitas pertanggungjawaban dan penanganan

dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan sumber daya alam, sehingga, akan tercipta harmonisasi dan keseimbangan antara kegiatan perekonomian (*profit*), sosial (*people*) dan pelestarian terhadap lingkungan hidup (*planet*) oleh korporasi sesuai dengan prinsip *Triple Bottom Lines CSR* (Keuntungan, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan) sebagai tonggakunya.

Salah satu sungai yang berada di Bandung adalah Sungai Cikapundung. Sungai ini mengalir dari Bukit Tunggul, Bandung Utara dan bermuara di Sungai Citarum di selatan Bandung. Pada koridor Sungai Cikapundung, terdapat titik-titik yang menarik, misalnya hutan dan peternakan di bagian utara sungai. Setelah itu, sungai mengalir menuju pemukiman padat dan kemudian pusat kota dan bangunan heritage.

Sungai Cikapundung juga menjadi pusat dari beberapa komunitas, misalnya Komunitas Cikapundung yang salah satunya bermarkas di bawah Jembatan Pasupati, tepatnya di Tamansari. Komunitas Cikapundung juga sering mengadakan olahraga yang unik yaitu kukayaan. Bayangkan menaiki ban besar seperti di seluncur

kolam renang namun di atas Sungai Cikapundung, nah itulah kukayaan. Selain itu, kukayaan juga berfungsi untuk menjaga kebersihan Cikapundung dengan menangkapi sampah yang kadang muncul di sungai.

Sungai Cikapundung merupakan sungai sepanjang 28 km yang mengalir di tiga kabupaten/kota, kab. Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kab. Bandung. Sungai yang bermuara ke Sungai Citarum ini memegang peran yang cukup penting sebagai drainase utama pusat kota dan salah satu penyedia air baku bagi PDAM Kota Bandung yang membangun instalasi penyadapan di Dago Pakar, Dago, dan Badak Singa. Namun demikian, kondisi Sungai Cikapundung secara umum semakin memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah banyak permukiman penduduk di sekitar sungai ini. Sekitar 750.559 jiwa penduduk menetap di sekitar aliran Sungai Cikapundung dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung. Aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar aliran sungai, seperti membuang limbah cair rumah tangga, sampah, dan kotoran ternak ke

sungai, memberi kontribusi yang cukup besar dalam pencemaran Sungai Cikapundung.

Salah satu solusi yang telah diambil pemerintah Kota Bandung dalam menangani persoalan Cikapundung ini adalah merevitalisasi kawasan Sungai Cikapundung. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031, Kawasan Sungai Cikapundung ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kota dan mendapat prioritas utama dalam perencanaan Kota Bandung ke depan. Program revitalisasi Sungai Cikapundung ini baru diresmikan akhir tahun 2013 lalu oleh walikota Bandung, Ridwan Kamil, dengan optimalisasi ruang terbuka publik sekitar Sungai Cikapundung sebagai tahap pertama revitalisasi. Kawasan sekitar sungai wilayah Siliwangi akan dijadikan sebagai area ruang terbuka publik dan akan dibangun amfiteater untuk mendukung aktivitas sosial warga. Tahap pertama revitalisasi ini didukung dengan biaya APBN sebesar lebih dari Rp3 Miliar.

Dalam pelaksanaan program revitalisasi tahap pertama ini, ternyata dihadapkan oleh

permasalahan permukiman penduduk di sekitar area sungai yang sudah menetap disana sejak lama. Permukiman tersebut secara hukum merupakan permukiman ilegal karena tidak memiliki IMB. Meskipun demikian, penduduk disana sudah memiliki rumah yang permanen dan telah menetap sejak lama. Adanya permukiman di wilayah sempadan sungai ini ternyata menghambat program revitalisasi tahap pertama ini, sehingga muncul wacana pemerintah merelokasi sekitar 31 KK yang berada di area program revitalisasi ini ke Rumah Susun yang telah disediakan di Sadang Serang.

Pada prinsipnya, pemerintah ingin mengembalikan fungsi Sungai Cikapundung dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka publik di sekitar aliran sungai dengan melaksanakan program revitalisasi, tetapi merelokasi masyarakat di sekitar sungai tidak bisa begitu saja dilakukan dengan melihat sisi legalitas permukiman tersebut.

Revitalisasi Sungai Cikapundung

Revitalisasi sungai Cikapundung yang akan dijadikan ruang publik berpusat di ruas sungai sisi Jalan

Siliwangi, Bandung, terkendala oleh permukiman warga di tanah milik negara tersebut. Penataan sungai Cikapundung sudah mulai berjalan, walaupun masih terkendala masalah tanah milik negara yang sudah lama ditinggali warga. Ada sekira 13 bangunan rumah yang total lebarnya 750.000 meter. Pemerintah Kota Bandung berencana akan merelokasi warga di bantaran sungai Cikapundung ke rumah susun di Cingised, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Bandung, tanpa uang penggantian. Sungai ini akan dijadikan kawasan ruang public dan akan menjadi zona edukatif, zona olahraga, zona entertainment, dengan dua plaza yang dapat menampilkan berbagai aktivitas hiburan. Ini adalah cara membangun Bandung dengan cara berkolaborasi, dalam waktu tak terlalu lama akan diwujudkan pembangunan yang monumental bagi warga Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merencanakan akan merevitalisasi sungai Cikapundung di titik Jalan Siliwangi, Kota Bandung. Kawasan itu akan difungsikan sebagai ruang publik, yakni tempat istirahat, rekreasi, dan kegiatan musik. Selain sebagai ruang publik, Pemkot Bandung juga akan menghadirkan

amfiteater di kawasan sungai Cikapundung. Merujuk pada bangunan Romawi kuno, amfiteater adalah semacam bangunan terbuka berbentuk melingkar dengan "panggung" yang dipakai sebagai tempat pertandingan atau pertunjukan umum. Di kawasan itu akan dibangun pula bendungan kecil untuk pembangkit listrik. Lokasi bendungan direncanakan berada di ruas sungai di sekitar Jalan Braga, Kota Bandung, berdekatan dengan kantor PLN setempat. Nanti ada lampu-lampu menyala di sepanjang sungai. Sumber listriknya dari bendungan itu. Revitalisasi Sungai Cikapundung tak melupakan unsur pemberdayaan ekonomi untuk warga yang tinggal di sekitar bantaranya. Seperti Sungai Citarum pada umumnya yang mengalami pencemaran berat, sungai Cikapundung juga menghadapi persoalan yang sama. Selain limbah rumah tangga dan kotoran manusia, penyumbang pencemaran sungai adalah kotoran ternak sapi dalam jumlah besar. Yang terpenting dalam upaya revitalisasi ini adalah peran serta seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti ke sungai. Harapannya kawasan ini akan menjadi

area ruang publik yang ramah lingkungan pada warga Bandung.

Kesimpulan

Keberhasilan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial. Artinya bahwa sukses komersial perusahaan-perusahaan dilihat juga dari bagaimana perusahaan mengelola aktivitas tanggung jawab sosial terhadap komunitas di sekitar daerah operasinya, sehingga upaya menciptakan hubungan antar komunitas sebagai anggota komunitas lokal yang lebih luas, perlu dipertimbangkan. Secara umum CSR yang dilakukan suatu perusahaan merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bagi komunitas atau para *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Kegiatan CSR memiliki arti adanya kemampuan perusahaan secara manusiawi untuk dapat merespon keadaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Tentu saja tanggung jawab sosial ini akan dapat dinikmati dan dimanfaatkan tidak saja oleh lingkungan sekitar yang menjadi sasaran, melainkan juga bagi perusahaan itu sendiri akan dirasakan manfaatnya, khususnya dalam penciptaan,

peningkatan, dan pemeliharaan citra perusahaan di mata masyarakat.

Dengan kata lain, CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk menghasilkan efek positif pada komunitas, bahkan dapat menjadi efek domino yang memberikan keuntungan tidak saja bagi komunitas maupun para *stakeholder* (baik internal maupun eksternal) tapi keuntungan juga akan diperoleh bagi perusahaan pelaku CSR itu sendiri. CSR yang dilakukan dalam bentuk aktivitas *social marketing PR*, tentu saja membawa konsekuensi adanya konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) yang harus diimplementasikan secara etis dan legal. Dalam konteks PR, tanggung jawab sosial perusahaan itu diimplementasikan dalam program dan kegiatan *community relations*. Terdapat berbagai contoh keuntungan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh berbagai perusahaan maupun instansi. Di Inggris, sebuah survei membuktikan, bahwa 86% konsumen merasa melihat suatu citra positif sebuah perusahaan jika mereka melihat perusahaan tersebut benar-benar melakukan sesuatu untuk menjadikan dunia suatu tempat yang lebih baik. Selain itu, Di Amerika, tahun 1999, survei lembaga Environic menyatakan

sepertiga konsumen di Amerika Serikat yang menyukai produk-produk dari perusahaan yang memiliki visi bisnis pembangunan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan di Indonesia, data riset majalah SWA atas 45 perusahaan menunjukkan CSR bermanfaat memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 persen), hubungan baik dengan masyarakat (16,82 persen), dan mendukung operasional perusahaan (10,28 persen) (*Sinar Harapan 16/03/2006*). Hal ini membuktikan bahwa sudah saatnya bagi setiap perusahaan maupun instansi untuk memperhatikan CSR karena banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dalam pengaplikasiannya. Diharapkan bagi seluruh *stakeholders* dapat bersama-sama bekerjasama mengembangkan CSR, sehingga *sustainability* (human, economic, social maupun environment) dapat terwujud. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut tentu diperlukan langkah-langkah yang responsif dan antisipatif dari pihak korporasi sebagai salah satu pemangku kepentingan.

Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penuangan isu *good corporate social responsibility* harus dituangkan hitam diatas putih dalam kerangka ijin investasinya dengan sanksi siap untuk dicabut dan juga dituntut pertanggungjawabannya secara hukum sebagai wujud deregulasi atas peraturan dan kebijakan yang selama tidak responsif terhadap isu-isu pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk proaktif dalam mengontrol dan mengawasi jalannya kebijakan disetiap tingkatan.
- b. Langkah kedua adalah transparansi korporasi dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasi program dibidang lingkungan sebagai upaya untuk membuka ruang korektif sehingga tercipta diskursus mengenai format yang lebih sesuai dan akomodatif dalam menanggapi persoalan mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Langkah Ketiga adalah mengevaluasi dan menata ulang (*redesign*) konsep serta pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh korporasi dalam mengelola dan melestarikan lingkungan agar lebih menyeluruh (*holistic*) dan tersistematisasikan secara konkret dilapangan. Dari langkah tersebut diharapkan mampu menstimulasi peranan korporasi melalui program CSR-nya
- d. Langkah keempat adalah membuka dan memberikan ruang partisipasi publik yang seluasnya-luasnya sehingga mampu menciptakan pola koordinasi yang lebih efektif dengan para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Komang. 2008. *Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam* <http://ejournal.nud.ac.id/km%20ardana.pdf> . Diakses pada 26 Oktober 2008
- Cahyat, Ade. 2004. *Bagaimana Kemiskinan di Ukur: Beberapa Model*

- Penghitungan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: *Center for International Forestry Research* (CIFOR).
- Djajadiningrat, dkk. 2003. *Akses Peran Serta Masyarakat: lebih Jauh memahami Community developent*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development
- Ife, Jime. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- _____. 2002. *Community Development: Community-based Alternatives in Age of Globalisation Edisi Kedua*. Australia: Pearson Education.
- Irawan, Ronny. *Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia*. Makalah Seminar *The 2nd National Conference*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 6 September 2008.
- Jackie Ambadar. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. Wujud Kepedulian Dunia Usaha*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Jahja, Rusfadia Saktiyanti. 2006. *Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ekstraktif dalam Jurnal Galang*, Vol.1, No.2, Hal.22-35, Edisi Januari 2006.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Devi. 2007. *Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam Usaha Pengembangan Masyarakat, Skripsi*. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nursahid, Fajar. 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*. Depok: Piramedia
- Rahman, Santy Rizkiya. 2008. *Analisis terhadap Corporate Social Responsibility dan Pengaturannya di Indonesia. Studi Kasus: Corporate Social Responsibility PT.Freeport Indonesia pada Suku Amungme di Desa banti, Papua. Skripsi*. Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sitorus, MT Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial.
- Suprpto, Siti A.A.2006. *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta dalam Jurnal Galang*, Vol.1, No.2, Hal.36-61, Edisi Januari 2006.

Supriyanto, Subejo. 2004. *Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan* dalam <http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/supriyanto-ekstensia.pdf>. Diakses pada 24 Oktober 2008.

Syahyuti. Penerapan Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas: Studi Kasus pada Rancangan Program Primatani dalam www.geocities.com/syahyuti/pendekatan_komunitas_primatani.pdf. Diakses pada 1 April 2009